# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manajemen memiliki nilai strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui menejemen akan tercipta suatu kondisi yang memungkinkan suatu organisasi dapat berjalan efektif. Manajemen dalam suatu organisasi merupakan pelibatan seluruh komponen yang secara bersama-sama melakukan peran sesuai dengan kapasitasnya. Olehnya itu dalam implementasinya dibutuhkan adanya kapasitas manajerial oleh pimpinan organisasi.

Secara umum, manajemen merupakan kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau *'act of running and controlling a business'* Oxford (2005) (Mahfud dan Dayat :2009). Selanjutnya secara khusus Stoner (1982) (Wahjosumidjo 2003:95) memberikan batasan manajemen sekaligus menunjukkan usnur-unsurnya yaitu manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan.

Pemahaman terhadap unsur-unsur manajemen memberikan makna bahwa manajemen merupakan suatu rentetan langkah yang terpadu, sistematis dan sistemik untuk mengembangkan suatu organisasi. Sistematis menunjukkan adanya suatu proses yang

berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan-tujuan, sedangkan sistemik adalah suatu kesatuan seluruh unsur-unsur manajemen yang berhubungan secara terintegrasi dalam mewujudkan suatu tujuan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang membutuhkan pengelolaan atau manajemen secara baik sehingga dapat terwujud sistem pendidikan yang bermutu. Hal tersebut dimungkinkan karena pendidikan merupakan suatu sistem yang dalam pelaksanaannya bersifat berkesinambungan atau berproses. Dalam keseluruhan prosesnya, persekolahan merupakan inti dari keseluruhan sistem pendidikan dalam artian seluruh unsur manajemen terpadu secara bersama-sama dalam usaha pencapaian tujuan yang telah disepakti.

Manajemen dalam persekolahan merupakan modal utama untuk mengelola sistem persekolahan, melakukan perubahan pola pikir, penetapan tujuan dan sasaran sekolah. Modal ini akan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan sekolah. Pada masalah poko ini diperlukan berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas. Ketika melihat peluang, dan peluang itu dijadikan modal, kemudian modal menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan yang disertai komitmen yang tinggi, maka secara otomatis akan terjadi sebuah efek positif dalam pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya, serta marketing pendidikan.

Salah satu dari penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah penyelenggaraan manajemen sekolah yang dilandasi oleh paradigma lama yang berorientasi pada pendidikan birokrasi hirarkies yang tidak banyak memberi ruang bagi manajemen sekolah, sedangkan paradaigma pendidikan baru bergeser pada pendidikan demokratis yang beradasarkan pada kondisi sekolah dan bukan lagi pedoman dari pusat.

Untuk menuju perubahan pendidikan secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan.Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana-prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *planning, organizing, actuating,* dan *controlling* dalam penggunaan sumberdaya organisasi (Terry 1986:5). Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan. (Mahfud dan Dayat,2009).

Dalam sekolah sebagai organisasi kemasyarakatan kepala sekolah sebagai pemimpin memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan manajemen. Manajemen yang dinamis menuntut peranan kepemimpinan dalam menerapkan fungsi kepemimpinan secara berkesinambungan. Dalam hal ini peranan kepala sekolah menjadi sangat penting.

Kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki kemampuan, baik kemampuan manajerial maupun kemampuan tekhnis, kemampuan manajerial kepala sekolah terlihat dari perannya dalam merencanakan dan mengelola seluruh sumberdaya yang dimiliki, sedangkan kemapuan teknisnya terlihat dari peran kepala sekolah dalam membimbing guru dan staf dalam menyusun program kerja atau pun dalam proses belajar mengajar. Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah menjadi cermin tingkat kualitas yang dimiliki suatu sekolah itu sendri. Dengan kata lain keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah (Wahjosumidjo, 2003 : 82).

Pentingnya keberadaan kepala sekolah sangat menentukan. Kepala sekolah adalah pelaksana suatu tugas yang sarat dengan harapan dan pembaharuan, sebab itu kepala sekolah adalah inovator. Kemasan cita-cita mulia pendidikan secara tidak langsung diserahkan

kepada kepala sekolah karena keberhasilan sekolah menjadi tanggungjawab kepala sekolah.

Begitu strategis dan besarnya harapan pada kepala sekolah, Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 17 April 2007 mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah. Standar tersebut sebagai salah satu standar ketenagaan diantara delapan standar yang harus ditetapkan untuk mewujudkan Standar Nasional Pendidikan yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan tujuh standar lainnya adalah standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.

Untuk mendukung Standar Nasional Pendidikan menurut Permendiknas di atas, seseorang menjadi kepala sekolah wajib memenuhi Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang berlaku nasional yaitu standar kualifikasi dan standar kompetensi. Standar tersebut sekaligus merupakan gambaran minimal kapasitas kepala sekolah dalam mengelolan pendidikan di sekolah.

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 mengisyaratkan adanya trimitra manajemen mutu pendidikan yaitu Standar Nasional Pendidikan, Penjamin Mutu Pendidikan dan Akreditasi Satuan Pendidikan.

Peran kepala sekolah menjadi strategis dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan sebagai cerminan sekolah bermutu. Namun demikian masih dibutuhkan kajian-kajian ilmiah yang mendukung konsep peran kepala sekolah dalam mendorong perwujudan sekolah bermutu. Untuk maksud tersebut, maka dipilih sekolah sasaran pengkajian pada tingkat SMA.

Data yang ada pada lingkup Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Soppeng, menunjukkan adanya indikasi peran kepala sekolah dalam mendorong pemenuhan sekolah terhadap standar nasional pendidikan, sebagaimana tergambar dalam tabel 1.

Data dalam tabel 1 menunjukkan bahwa dari 12 SMA yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat 8 SMA yang telah mendapatkan status terakreditasi, masing-masing terdiri atas 5 SMA (41,67%) terakreditasi A, 3 SMA (25%) terakreditasi B, dan selebihnya masih ada 4 SMA (33,33%) yang belum terakreditasi.

Dari data tersebut, diasumsikan adanya perbedaan kualifikasi akreditasi SMA menunjukkan adanya perbedaan kapasitas manajemen atau kemampuan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan sekolah. Perolehan predikat terakreditasi ataupun belum terakreditasi, tidaklah terlepas dari peran kepala sekolah dalam mendorong kinerja sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagai standar mutu sekolah.

Tabel 1

Jumlah SMA di Kabupaten Soppeng dirinci berdasarkan status akreditasinya

| NO | NAMA SEKOLAH | STATUS AKREDITASI |
|---|---|---|
| 1. | SMAN 1 Watansoppeng | A |
| 2. | SMAN 2 Watansoppeng | A |
| 3. | SMAN 1 Marioriawa | A |
| 4. | SMAN 1 Liliriaja | A |
| 5. | SMAN 1 Marioriariwawo | A |
| 6. | SMAN 1 Lilirilau | B |
| 7. | SMA PGRI Watansoppeng | B |
| 8. | SMAN 3 Watansoppeng | B |
| 9. | SMAN 1 Donri-Donri | - |
| 10. | SMA Islam Yasrib | - |
| 11. | SMA Muhammadiyah Lajoa | - |
| 12. | SMA Calio | - |

Sumber : BAS/M Prov Sulsel, 2013

Indikasi adanya perbedaan kapasitas manajemen kepala sekolah dengan keberhasilan sekolah dalam mewujudkan sekolah bermutu, mendorong adanya suatu kajian ilmiah sebagai kerangka empiris dalam pembuktian gejala komparasi tersebut.

Hal itulah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan kapasitas manajemen kepala sekolah dan memilih judul “Perbedaan Kapasitas Manajemen Kepala Sekolah Di

Kabupaten Soppeng (Studi kasus SMA terakreditasi A dan terakreditasi B)".

B. Pokok Pemasalahan

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan pemikiran sebagaimana tertuang dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi acuan penelitian adalah

"Apakah terdapat perbedaan kapasitas manajemen kepala sekolah pada SMA terakreditasi A dengan terakreditasi B di Kabupaten Soppeng?"

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kapasitas manajemen kepala sekolah pada SMA akreditasi A dan akreditasi B.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan demi pengembangan ilmu administrasi khususnya dalam pengembangan ilmu manajemen dan kependidikan serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggeluti bidang manajemen sumber daya aparatur.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian diharapkan bermanfaat menjadi masukan dalam rangka pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dimasa mendatang, khususnya pada SMA di Kabupaten Soppeng.